



Ilustrasi: Rizky Aisyah

# Ruang Hidup Kembali dengan Damai

*Ludvia dan Rizkirana Kamilazzahra Pramono*

Judul Buku

**Membangun Kesadaran: Kisah-kisah Gerakan Tolak Tambang di Manggarai Raya dengan Memanfaatkan Pengetahuan Lokal**

Penulis

**Simon Suban Tukan, SVD, dan Mirisa Hasfaria**

Tahun Terbit

2018

Penerbit

**JPIC SVD dan INSISTPress**

Jumlah Halaman

**iv + 52 halaman**

Bahan mineral merupakan berkah alam yang tersedia dalam jumlah yang berlimpah untuk dimanfaatkan manusia. Namun, bukan berarti ia dapat dikeruk secara berlebihan. Ia tetap harus dimanfaatkan secara arif dengan mempertimbangkan hak manusia, komunitas adat, dan alam.

Kekayaan berwujud pada yang bermodal, limbah berakhir kepada masyarakat. Eksploitasi tambang di Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, telah merampas hak-hak masyarakat dan mengancam keselamatan serta keberlanjutan masyarakat, terutama daerah lingkaran tambang. Namun, masyarakat lingkaran tambang di Manggarai tidak hanya pasrah dengan keadaan. Mereka memperjuangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya akan pembangunan yang menyejahterakan dan berkeadilan sosial kepada pemerintah dan korporat.

Masyarakat bergerak bersama dengan Justice, Peace and Integrity of Creation dari Societas Verbi Divini di Ruteng, Manggarai (JPIC SVD Ruteng). JPIC SVD Ruteng merupakan sebuah komisi resmi dalam institusi Gereja Katolik yang berkarya di wilayah pastoral Manggarai Raya, Sumba, dan Bima. Komisi ini lahir sebagai bentuk kepedulian dan komitmen terhadap usaha-usaha pembangunan keadilan dan perdamaian, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian alam dan makhluk hidup di dalamnya. Prioritas kongregasi SVD meliputi isu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Salah satu persoalan yang menjadi isu utama JPIC SVD Ruteng adalah memerangi kehadiran industri pertambangan di wilayah Manggarai. Komisi ini menganggap bahwa

kehadiran industri pertambangan sarat dengan persoalan kerusakan alam, instabilitas ekosistem alam, dan pelanggaran hak asasi masyarakat lingkaran tambang (Effendi, dkk., 2020). Maka dari itu, JPIC SVD Ruteng berupaya untuk mengadvokasi dampak negatif pertambangan dan memberdayakan masyarakat lingkaran tambang serta korban ketidakadilan di Manggarai Raya.

Industri pertambangan kini berada di posisi dilematis, sebab ia tidak dapat dilepaskan dari bayang-bayang isu kerusakan alam dan ketidakadilan. Permasalahan tersebut dibahas dalam buku karya Simon Suban Tukan, SVD, dan Mirisa Hasfaria, yang berjudul *Membangun Kesadaran: Kisah-kisah Gerakan Tolak Tambang di Manggarai Raya dengan Memanfaatkan Pengetahuan Lokal*.

Simon Suban Tukan merupakan koordinator JPIC SVD Ruteng sejak tahun 2006. Ia mengabdikan dirinya untuk mengadvokasi masyarakat lingkaran tambang dan memberdayakan masyarakat yang menjadi korban atas ketidakadilan pemerintah dan korporat. Sementara itu, Mirisa Hasfaria menggeluti isu-isu pembangunan manusia, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan kewarganegaraan, dan gender.

Buku ini hadir sebagai refleksi pengalaman JPIC SVD Ruteng dan mitra-mitra lainnya dalam mengadvokasi masyarakat lingkaran tambang di Manggarai. Perjuangan ini mengedepankan cara aktif dan damai serta menggunakan pengetahuan lokal sebagai landasan. Implementasinya adalah dengan membangun, memperluas, dan memperkuat kesadaran kritis masyarakat agar dapat mempertahankan hak-haknya dari pemerintah dan korporat. Hal tersebut karena ketidakadilan

mewujud dalam kebijakan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah Manggarai Raya maupun aktivitas tambang oleh perusahaan.

*Gendang One* (rumah), *Lingkong Pe'ang* (tanah garapan), *Natas Bate Labar* (halaman kampung), *Compang Bate Takung* (tempat sesajen), dan *Wae Bate Teku* (mata air), merupakan dasar serta jati diri masyarakat Manggarai. Kelimanya merupakan manifestasi dari hubungan manusia, alam, dan leluhur yang harmonis. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan di Manggarai Raya yang tidak memerhatikan unsur-unsur tersebut dapat mengancam keutuhan alam ciptaan Tuhan. Selain itu, ditilik dari sisi geografis, Manggarai berada di wilayah yang kurang menguntungkan. Manggarai terletak di Pulau Flores yang merupakan bagian dari cincin api pasifik. Gempa dan kekeringan sering melanda. Akibatnya, akses air bersih menjadi sulit dan gagal panen terjadi. Keberlanjutan hidup masyarakat Manggarai sangat erat dengan keadaan alam. Apabila daya dukung lingkungan tidak seimbang, kehidupan manusia juga akan lenyap. Dengan demikian, upaya perjuangan dan advokasi ini krusial bagi masyarakat Manggarai, khususnya warga lingkaran tambang.

Pertambangan di Manggarai Raya telah dimulai sejak tahun 1980 dengan adanya penyelidikan umum oleh PT Aneka Tambang. Di perut bumi Manggarai, setidaknya ditemukan dua jenis bahan galian mineral, yakni logam emas (Au) dan mangan (Mn). Mineral mangan hanya tertutup sekitar 15 m di bawah permukaan tanah, dengan konsentrasi tertinggi di Indonesia (Wardhani, et al., 2017).

Eksplorasi mangan pun pertama

kali dilakukan pada tahun 1997 di daerah Torong Besi oleh PT Istindo Mitra Perdana dengan izin usaha pertambangan seluas 73,8 ha selama 11 tahun yang diterbitkan oleh Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1546.K/2014/MPE/1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Dua tahun kemudian, perusahaan tersebut kembali diberikan kuasa pertambangan eksploitasi oleh Departemen Pertambangan dan Energi melalui Surat Keputusan No.494.K/24.02/DJP/1999 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum di daerah Lengko Lolok sebesar 1.307 ha untuk jangka waktu 21 tahun.

Pada awalnya, kegiatan pertambangan di Manggarai tidak banyak diketahui oleh publik. Baru sejak tahun 2006-lah, media massa mulai menyoro aksi protes para pekerja tambang. Hal tersebut bermula dari adanya tuntutan mereka mengenai upah rendah, kondisi kerja buruk, dan kematian seorang pekerja di lokasi tambang yang mengeksplisitkan problem nyata di wilayah pertambangan. Pada waktu yang sama, pemberitaan tersebut menjadi awal mula keterlibatan JPIC SVD dalam gerakan advokasi penolakan tambang. Dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang, JPIC SVD memaparkan kondisi konkret area pertambangan, seperti fasilitas keselamatan kerja yang sangat jauh dari standar, lubang-lubang galian besar yang tidak ditutup kembali, air sumur yang tercemar polusi mangan, dan bukit-bukit yang rata akibat diledakkan.

Kemudian, dalam investigasi lebih lanjut, tim JPIC SVD menemukan lebih banyak pelanggaran kegiatan pertambangan, seperti pelanggaran

hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran hak ekonomi dan budaya berupa penggusuran lahan kelola warga (*lingko*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal Manggarai. Sementara itu, pelanggaran hak sosial ditunjukkan dengan pencemaran lingkungan warga oleh limbah mangan. Selain itu, JPIC SVD juga menggarisbawahi pelanggaran hak-hak sipil dan politik warga karena pemberian izin pertambangan tidak melibatkan musyawarah warga sebagai pemegang hak pemilik lahan.

Dalam gerakan advokasi ini, JPIC SVD sangat menekankan keterlibatan masyarakat guna membangun kemauan dan kesadaran masyarakat untuk melawan pihak perusahaan pertambangan. Pengadaan diskusi kelompok terfokus, seminar, kampanye, dan dialog di radio (hal. 13) merupakan beberapa cara yang dilakukan JPIC SVD untuk memperdalam pemahaman dan kesepahaman warga terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Usaha ini kemudian diperkuat dengan membangun jaringan yang luas hingga level internasional. Jaringan ini saling berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan hak-hak masyarakat serta komunitas adat.

Ketika dialog dan lobi yang dilakukan oleh warga dan JPIC SVD masih belum membuahkan hasil, mereka memilih jalan protes damai. Pada awalnya, protes ini berjalan dengan menduduki lokasi konsesi dan berjalan kondusif. Namun, hal tersebut berubah menjadi kacau karena kepolisian dan perusahaan yang mencoba untuk membubarkan protes warga. Akan tetapi, dukungan dari luar semakin luas mengalir setelah media memberitakan peristiwa ini.

Strategi-strategi advokasi masyarakat oleh JPIC SVD akhirnya dianggap efektif ketika mereka berhasil melahirkan perubahan dalam beberapa aspek; yakni sikap aparat, materi kebijakan, dan tata laksana kebijakan. Dalam penjelasan di buku ini, perubahan sikap aparat digambarkan menjadi lebih terbuka atas usul dan saran masyarakat. Kemudian, materi kebijakan yang diterbitkan juga menjadi lebih ketat terhadap operasi kegiatan tambang dengan pemerintah membekukan Izin Usaha Pertambangan lama dan tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan baru. Tata laksana, berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan regulasi dan transparansi dalam segi prosedur, perumusan, dan penegakan.

Namun, sayangnya, dalam pembahasan hasil-hasil gerakan tolak tambang ini, JPIC SVD belum memperhatikan secara menyeluruh perspektif masyarakat. Buku ini tidak memberikan penjelasan rinci tentang pemulihan profesi masyarakat dan keamanan lingkungan dari polusi serta ancaman pertambangan yang telah terjadi. Selain itu, cara mengatasi dampak yang terjadi di *lingko* sebagai objek pelanggaran hak adat masyarakat juga tidak dibahas secara terperinci dalam buku ini.

Meskipun demikian, perjuangan dengan cara-cara yang aktif dan damai, serta berlandaskan kepada kebijaksanaan dan pengetahuan lokal, dapat memberikan hasil yang nyata. Hal tersebut tidak lepas dari peran warga, JPIC SVD dan mitra, serta jejaring pergerakan yang telah terbentuk. Selain itu, ada dua kunci yang mampu menyukseskan upaya advokasi masyarakat. *Pertama*, fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam gerakan, yaitu perubahan kebijakan yang

mendukung kepentingan masyarakat lingkaran tambang. *Kedua*, masyarakat yang menginginkan perubahan haruslah menjadi pelaku perubahan itu sendiri.

Tanpa keinginan kuat mereka, gerakan ini tidak akan membuahkan hasil. Gerakan melawan pertambangan juga harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga pengetahuan dan keterampilan masyarakat perlu diperbarui. Peran dari lembaga perantara,

seperti JPIC SVD untuk menjembatani pengetahuan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan agar bermanfaat dan berpihak kepada masyarakat juga amat penting. Dengan begitu, masyarakat dapat meneguhkan haknya dari situasi ketidakadilan akibat kegiatan tambang. Mereka dapat menyatakan penerimaan atau penolakan pada segala bentuk intervensi terhadap keberadaan tanah adat atau sumber daya alam di dalamnya.

---

#### **Daftar Pustaka:**

- Ericsson, Magnus, and Olof Löf. 2019. "Mining's Contribution to National Economies between 1996 and 2016." *Mineral Economics* 32 (2): 223–50. <https://doi.org/10.1007/s13563-019-00191-6>. (diakses 11 Juni, 2022)
- Effendi, Yulius Rustan; Segar, Alfons; and Maot, Yohanes Fibrino. *Peran Profetik Gereja Mengadvokasi Masyarakat Korban Usaha Pertambangan Di Manggarai, Flores Barat, Indonesia Timur*. Academia.edu, 2020.
- Wardhani, Indah Surya, Ashari Cahyo Edi Edi, and Hening Kartika Nudya. "The Roles of the Church amidst Environmental Advocacy in Manggarai, East Nusa Tenggara." In *In Search of Key Drivers of Indonesia Empowerment*, edited by Rosdiana Sijabat, Ati Cahayani, and Rusminto Wibowo, 168–73. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017.